

Penjabat Bupati Bekasi Tinjau Gunung Sampah TPA Burangkeng

BEKASI (IM) - Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengajak unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bekasi beserta perangkat daerah terkait meninjau kondisi gunung sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu yang sudah kelebihan kapasitas.

"Hari ini kita melaksanakan kunjungan ke Desa Burangkeng khusus lokusnya adalah TPA Burangkeng karena memang saat ini kondisinya sedang kritis akibat daya tampung yang sudah penuh," katanya di Bekasi, Sabtu.

Dia pun mengajak rombongan meninjau lokasi rencana perluasan lahan yang segera dibebaskan pemerintah daerah dalam waktu dekat. Perluasan lahan seluas 2,1 hektare itu menjadi solusi jangka pendek untuk menampung sampah setidaknya sepanjang tahun ini.

"Perluasan ini merupakan solusi jangka pendek yang akan dipercepat Pemkab Bekasi untuk menampung sampah-sampah dari wilayah yang per harinya mencapai 600 ton. Dengan dilakukan perluasan ini diharapkan dapat menampung sampah dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan," katanya.

Setelah menyelesaikan perluasan lahan tahap pertama, pemerintah daerah

kembali akan membebaskan lahan seluas lima hektare untuk dibangun pabrik pengolahan sampah.

"Rencana kita tahun ini juga akan melakukan pembangunan jalan umum pengganti yang saat ini dipakai TPA, akan kita lakukan pada triwulan satu ini dan juga pemagaran agar sampah tidak jatuh ke luar area TPA yang akan kita lakukan secara bertahap," katanya.

Dia pun menyempatkan diri untuk berdialog dan menampung aspirasi masyarakat sekitar TPA Burangkeng. Salah satunya terkait kompensasi yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DPRD. Pemerintah daerah menargetkan sebelum Lebaran tahun ini, pembayaran ganti untung lahan sudah selesai dilakukan," katanya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kajari Kabupaten Bekasi, Kepala PN Cikarang, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi. Kepala perangkat daerah terkait pun turut bersama rombongan. ● yan

FOTO: ANT



KONSER DEWA 19 DI JIS

Vokalis Dewa 19 Once Mekel tampil dalam konser Dewa 19 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (4/2). Konser bertajuk "Pesta Rakyat Dewa 19" dalam rangka 30 tahun grup musik Dewa 19 berkarya.

Sebagian Warga Depok Keluhkan Sulitnya Proses Sertifikasi Tanah

DEPOK (IM) - Baru-baru ini terungkap ada sekitar 60 ribu bidang tanah di Kota Depok, Jawa Barat yang hingga kini belum memiliki sertifikat. Pemkot Depok pada Jumat (3/2) menargetkan bahwa kotanya bisa menjadi Kota Lengkap atau daerah yang seluruh bidang tanahnya telah bersertifikat pada 2025.

Namun, ternyata sebagian warga mengaku bahwa mereka telah berupaya untuk membuat sertifikat tanah. Hanya saja proses pembuatannya dikeluhkan sulit oleh warga, ada yang telah bertahun-tahun menunggu tapi belum kunjung selesai.

"Tanah saya dari girik urus ke BPN lewat notaris dari 2020 awal sampai sekarang nggak ada progres. Harusnya Mei 2021 selesai berdasarkan covernote janji notaris, tapi info notaris di BPN-nya ribet dimentalin terus berkas saya. Padahal biaya naik sertifikat sudah saya lunaskan 100 persen dari 2020," kata seorang warga Kelurahan Pondok Jaya, Cipayung, Kota Depok, Zaenal, Sabtu (4/2).

Dia menjelaskan, berkas-berkas telah dikirimkan sejak 2020, tapi sejak itu hingga kini belum ada kepastian yang ia dapatkan. "Masih mentah prosesnya, orang BPN pun belum ada yang datang ke lokasi padahal berkas masuk dari 2020," ujarnya.

Zaenal menyebut status tanahnya hingga kini masih girik meski sudah berupaya untuk mengajukannya. Padahal biasanya proses ini membutuhkan waktu paling lama 12 bulan.

"Poses normal paling lama 12 bulan makanya notaris berani keluarkan covernote 12 bulan. Tapi ini sampai tiga tahun info notaris berkas dimentalin terus sama BPN," katanya.

Adapun warga lain, Yudi mengaku mengalami kesulitan untuk membuat sertifikat tanah. Ia mengatakan telah mengikuti program pemutihan untuk yang menajikan pengurusan sertifikat yang mudah dan lebih murah.

"Waktu itu pas ada pemutihan atau apa gitu, yang bayar Rp 1,5 juta buat sertifikat. Tapi belum jadi-jadi, datanya sudah diserahkan ke RT RW, cuma sudah setahun lebih belum jadi-jadi," katanya.

Dia mengaku tanah yang didaftarkan berada di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Kota Depok dan hingga kini masih dalam status girik. Padahal ia menuturkan sudah menghabiskan uang hingga menunggu waktu yang cukup lama. Setiap bertanya kepada RT dan RW setempat, sertifikat tanah itu dikarakan belum selesai.

"Bilangnya dari sananya belum, takutnya berkas belum sampai ke BPN," ujarnya.

Adapun, BPN Depok dan pemkot mengaku terus berupaya untuk mengentaskan masalah ini. Seperti melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tahun ini permkot mendapat alokasi 1.900 bidang tanah yang akan tersertifikasi dari Kementerian ATR/BPN RI. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANT



FINAL 50 METER RIFLE 3 POSITIONS TEAM WOMEN

Petembak putri Swiss, Chiara Leone (tengah), Franziska Stark (kiri), dan Sarina Hitz (kanan) berselebrasi usai memenangi final 50 meter rifle 3 positions team women dalam kejuaraan ISSF World Rifle/Pistol 2023 di Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta, Minggu (5/2). Dalam nomor 50 meter rifle 3 positions team women, Swiss berhasil meraih medali emas disusul Kazakhstan mendapat medali perak sementara Indonesia memperoleh medali perunggu.

DPRD Dukung Pemprov DKI Sulap Lahan Tidur Jadi RTH

Untuk mengejar target pemenuhan RTH 30%, Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan warga pemilik lahan agar bisa menanam pohon. "Saya sarankan setiap RTH ditambahkan sarana edukasi, wisata, kesenian hingga tempat komunikasi. Kalau di setiap RTH ada seperti ini, saya yakin banyak warga yang memanfaatkan," kata anggota DPRD DKI, Panji Virgianto.

JAKARTA (IM) - Langkahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memanfaatkan lahan tidur menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendapatkan dukungan

ngah keterbatasan lahan. Lahan yang dimanfaatkan ini bisa milik Pemprov DKI yang belum terpakai maupun milik warga.

"Saya setuju sekali kalau RTH ini terus diperbanyak. Karena pemerintah mempunyai kewajiban, lahan terbuka harus memenuhi target 30 persen dari total luas kawasan," ujarnya, Minggu (5/2). Panji menilai, untuk mengejar target pemenuhan RTH 30%, Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan warga pemilik lahan agar bisa menanam pohon. "Saya sarankan setiap RTH ditambahkan sarana edukasi, wisata, kesenian hingga tempat komunikasi. Kalau di setiap RTH ada seperti ini,

saya yakin banyak warga yang memanfaatkan," katanya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta lainnya, Pantas Nainggolan mengungkap, untuk menambah target RTH, Pemprov DKI dapat memanfaatkan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang nantinya diperuntukkan bagi masyarakat. "Lahan fasos fasum juga bisa menjadi salah satu pemenuhan target RTH,"

tuturnya.

Ia menambahkan, pada hakikatnya target pemenuhan RTH bertujuan menciptakan ruang yang sehat, asri dan berdampak kepada kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat. "Jangan hanya memenuhi kebijakannya, tetapi harus punya skala prioritas yang didahulukan. Ini nantinya akan berdampak positif bagi masyarakat," tandasnya. ● yan

Warga Kelurahan Pejaten Timur Menunggu Normalisasi Kali Ciliwung

JAKARTA (IM) - Camat Pasar Minggu, Arif Wibowo menyebut banjir di wilayahnya paling sering terjadi di wilayah Kelurahan Pejaten Timur. Banjir di kelurahan tersebut bisa mencapai tinggi 1,5 meter. Banjir di kelurahan itu disebabkan belum dinormalisasinya Kali Ciliwung. Padahal, pembebasan sebanyak 200 bidang lahan di kelurahan itu sudah selesai.

"Ya sudah selesai untuk pembebasan lahan. Tapi kan kita memang menunggu giliran," kata Arif saat dihubungi, Minggu (5/2).

Arif menuturkan alur pengerjaan normalisasi memang bertahap mulai dari Bukit Duri, Manggarai, Cawang, Rawajati, hingga nantinya sampai di Pejaten Timur. Oleh karenanya, warga hanya bisa pasrah menunggu pengerjaan tersebut.

Untuk sementara ini, Arif

mengupayakan penguatan kapasitas warga agar tanggap dalam menghadapi banjir selama Kali Ciliwung di Kelurahan Rawajati belum dinormalisasi. "Kan air misal dari hulu, dari Bogor itu sudah ada informasi kenaikan bera, statusnya apa. Nah, itu kita siap-siap. Air datangnya 8 jam kan. Warga kita informasikan bahwa kira-kira jam sekian air akan sampai, akan banjir jadi peralatan dinaikkan semua ke lantai dua atau diselamatkan dulu," ujarnya.

Posko-posko pengungsian hingga logistik bagi warga juga sudah siap. "Ada perahu karet. Posko pengungsian ada beberapa titik. Tapi itu biasanya tidak lama. Kalau hujan reda, nggak sampai sehari ini sudah surut dengan dipompa. Cuma memang harus menunggu air Kali Ciliwung mengalir sepenuhnya ke hilir," tukasnya. ● yan

Stok Beras di Pasar Induk Cipinang Cuma Cukup Sampai 5 Hari

JAKARTA (IM) - Harga beras sedang mengalami kenaikan baik jenis medium maupun premium. Stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang bahkan semakin menipis.

Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Zulkifli Rasyid mengatakan saat ini stok beras di tempatnya hanya sekitar 13.000 ton. Stok itu hanya cukup sampai 5 hari jika dibagi berdasarkan rata-rata kebutuhan yang mencapai 3.000 ton/hari.

"Stok beras di Cipinang lebih kurang 15.000 ton. Kalau 15.000 ton menurut data kita itu (cukup sampai) 5 hari, kebutuhan pasar induk kan 3.000 ton/hari seharusnya. Jadi memang sangat menipis stok beras di Pasar Induk (Cipinang)," kata Zulkifli, Minggu (5/2).

Berdasarkan laman *pibc.foodstation*, stok akhir beras di Pasar Induk Cipinang mencapai 12.234 per 3 Februari 2023. Seharusnya ideal dari stok beras di sana adalah 35.000 ton sampai 45.000 ton.

Zulkifli berharap Bulog dapat secepatnya memasok beras untuk menekan harga beras di pasar. Sebelumnya diberitakan, Bulog akan memasok beras medium ke Food Station PIBC sebanyak 10.000 ton untuk meningkatkan stok

di sana.

"Stok beras di Pasar Induk (Cipinang) sangat kritis. Harapan satu-satunya untuk menanggulangi harga memang dari Bulog yang punya beras satu-satunya, yang lain nggak ada. Orang semua daerah itu pada mengeluh memang dia tuh nggak panen," ucapnya.

Jika Bulog tidak segera memasok beras ke Pasar Induk Cipinang, maka harga beras bukan tidak mungkin akan semakin terbang.

"Tujuannya menekan harga kan harus secepat mungkin tersupply beras itu ke pasar, baru bisa kita menekan harga. Kalau berasnya nggak ada, gimana kita mau menekan harga," sebutnya.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo mengatakan pasokan beras masih terus berjalan sampai minggu ini. Selain stok di Pasar Induk Cipinang, kecukupan pasokan beras berasal dari gudang Food Station, Gudang Bulog dan yang ada di pedagang.

"Pasokan masih terus berjalan sampai hari minggu ini. Biasanya hari minggu hanya sedikit pedagang yang buka di Pasar Induk Cipinang," tuturnya dihubung terpisah. ● yan

Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Ibu Kota Terkendala Pendatang Baru

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, penanganan kemiskinan di Ibu Kota terkendala adanya penambahan pendatang baru. Untuk itu, menurutnya, pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) diminta tanggap untuk senantiasa mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya.

"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangan pendatang baru," kata Pj Gubernur Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, dalam siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sabtu (4/2).

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial. Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopim-

da) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.

Karena semestinya, dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta. Selain itu, untuk target stunting di bawah 14 persen pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa anaknya usia di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.

"Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran," ujar Heru.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI, Untung

Budiharto menegaskan, akan ada banyak tantangan di tahun 2023, di antaranya resesi global dan memasuki tahun politik. Belum lagi tantangan lain, seperti tawuran, banjir, kebakaran, kemiskinan ekstrem dan stunting yang perlu diantisipasi.

"Apa yang kita hadapi ke depan tentu saja memerlukan kerja ekstra. Namun, yang terpenting adalah peran RW sebagai pemimpin yang melaksanakan kegiatan administrasi maupun pertahanan pertahanan dan keamanan di daerah. RW bisa mengatasi tantangan kalau bisa memacu masyarakat untuk bekerja sama, bergotong royong dan saling menghormati," kata Untung.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menambahkan, RW harus kompak. Peran RW sangat strategis dan menjadi pilar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), karena mulai dari urusan administrasi, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, ditangani di tingkat RW. ● yan

FOTO: ANT



PAMERAN FOTO LENSAN ANAK TERMINAL

Pengunjung melihat karya foto pada pameran Lensa Anak Terminal di Sekolah Master, Depok, Jawa Barat, Sabtu (4/2). Pameran 170 karya foto dari 12 anak-anak terminal di kawasan tersebut merupakan hasil pembelajaran bersama Komunitas Lensa Anak Terminal yang berlangsung hingga 12 Februari 2023.